

**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR TANPA IZIN  
ORANG TUA MENURUT FIQH ISLAM, KOMPILASI  
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

**EVY SUSANTY**

**ABSTRACT**

*The conclusion is that, first, in Islamic Fiqh, Islamic Law Compilation, and Law on Marriage, the marriage of minors without parental permission is not allowed. According to Islamic Fiqh and Islamic Law Compilation, legal consequence of the marriage of minors without parental permission is illegal or canceled. According to Law No.1/1974 on Marriage, legal consequence of the marriage of minors without parental permission is the marriage can be canceled. The significant difference found in Islamic Fiqh and Islamic Law Compilation, and Law on Marriage is in the aspects of the determination of age limit to get married and parental permission. It is suggested that, first, Article 2 paragraph (1) of Law on Marriage be an important guidance for those who are going to get married; second, to avoid the consequences resulted from the marriage of minors without parental permission, the prevention efforts should be done before the marriage occurs or the cancellation efforts should be done if the marriage has already carried out; and third, the age limit to get married in the Islamic Law Compilation and Law on Marriage must be changed into minimum 18 (eighteen) years old without distinguishing the age of man and woman. This age limit can, at least, meet the minimum age limit of 20 (twenty) years old according to the Convention of Child Rights, because this age is the most eligible condition of biological and psychological maturity*

*Keywords: Marriage of Minors Without Parental Permission, Islamic Fiqh, Islamic Law Compilation, Law on Marriage*

**I. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan menentukan beberapa prinsip, diantaranya perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Walaupun telah ditentukan peraturan dan asas atau prinsip mengenai perkawinan namun kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan, seperti melakukan perkawinan di bawah umur dan diikuti dengan perbuatan tanpa adanya izin dari orang tua khususnya untuk calon pasangan berjenis kelamin perempuan.

Perbuatan izin dari orang tua bagi anak yang akan melangsungkan

perkawinan di mana anak belum berusia 21 tahun merupakan pelaksanaan asas partisipasi keluarga sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, bagi yang berada di bawah umur 21 tahun untuk pria dan perempuan diperlukan izin dari orang tua.<sup>1</sup>

Perbedaan pandangan antara Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam memaknai pernikahan di bawah umur, pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum menentukan perkawinan di bawah umur tidak sah. Pernikahan di bawah umur menurut Negara dibatasi dengan umur. Sedangkan dalam Fiqih Islam, pernikahan di bawah umur tidak dibatas berdasarkan usia tetapi adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (tanpa batasan umur). sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan, “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Apabila dianalisa, terdapat suatu problematika hukum dalam hal memandang Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam kaitannya dengan Fiqih Islam. Izin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tampak disamaratakan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Sedangkan dalam Fiqih Islam menjelaskan izin yang diberikan disamakan dengan perwalian, dan hanya dibebankan kepada pihak perempuan saja. Berdasarkan keadaan tersebut maka pernikahan anak di bawah umur tanpa izin orang tua/wali, menurut Fiqih Islam, diartikan orang tua tidak bersedia menjadi wali pernikahan anaknya (perempuan).

Pada kapasitas ini harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan Syar'i atau alasan tidak Syar'i. Alasan Syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan Syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).<sup>2</sup> Jika seorang perempuan memaksakan diri untuk menikah dalam kondisi alasan-alasan seperti di atas, maka akad nikahnya tidak sah alias

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 21.

<sup>2</sup> HSA Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 90-91.

batil (batil artinya tidak sah), meskipun dia dinikahkan oleh wali hakim. Sebab hak kewaliannya sesungguhnya tetap berada di tangan wali perempuan tersebut, tidak berpindah kepada wali hakim. Jadi perempuan itu sama saja dengan menikah tanpa wali, maka nikahnya batil (tidak sah). Sabda Rasulullah SAW, ”Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad; Subulus Salam).

Perihal perkawinan selain dikenal dalam Fiqih Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.<sup>3</sup> Bustanul Arifin mempersoalkan, hukum Islam yang mana yang digunakan, Jika dalam suatu masalah tertentu didalamnya terdapat banyak pendapat. Menurutnya, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, di antara dua sumber hukum yang berbeda tersebut berpotensi menimbulkan penerapan yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari, maka dirasa penting untuk dilakukan penelitian tentang **“Perkawinan Anak di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Menurut Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Sebagai Judul Dalam Penelitian ini.**”

Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini adalah:

- A. Bagaimana pengaturan tentang perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua dalam Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
- B. Apakah akibat hukum dari perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua menurut Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- C. Apakah perbedaan dan persamaan dari perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua menurut Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 20.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 21.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan tentang perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua dalam Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- B. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua menurut Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- C. Untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan dan persamaan dari perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua menurut Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu Penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah hukum (penelitian doktrinal)<sup>5</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang dianalisis diungkapkan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus) dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.

## **III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **A. Pengaturan Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Dalam Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

#### **1. Pengaturan Berdasarkan Fiqih Islam**

Menurut Fiqih Islam semua tingkatan umur (usia) dapat melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup> Dikatakan anak dewasa atau tidak di bawah umur dalam Islam tidak didasarkan pada batasan usia tetapi berdasarkan *baligh*-nya seorang anak tersebut. Makna *baligh* atau *bulugh* dalam Fiqih Islam untuk menyebut fase kedewasaan seseorang tidak berdasarkan usia, tetapi didasarkan pada mimpi basah (*hulum*) baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan. Jadi, tidak dapat

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

<sup>6</sup> Yusuf Hanafi, *Op. cit.*, hal. 11.

diprediksi pada usia kapan seseorang itu dikatakan dewasa atau datangnya mimpi basahnya.<sup>7</sup> Secara lebih spesifik, dewasa (*baligh*) bagi anak laki-laki ditandai dengan datangnya mimpi basah sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 59 dan para pakar hukum Islam (*Fuqaha*) sepakat menyatakan bahwa mimpi basah merupakan indikator yang paling jelas bahwa seseorang anak laki-laki (*ghulam*) maupun anak perempuan (*jariyah*) telah mencapai wajib menjalankan hukum agama (*taklif*) termasuk dalam urusan perkawinan.<sup>8</sup> Hal itu menandakan bahwa berdasarkan Hukum Islam dan Fiqih Islam, syarat *baligh* untuk melaksanakan pernikahan merupakan syarat mutlak. Jadi bukan berdasarkan usia

Pandangan para mazhab dalam menentukan boleh tidaknya izin orang tua bagi anak perempuan untuk melangsungkan pernikahan, berbeda-beda satu sama lain. Para ulama mazhab sependapat bahwa wali untuk anak gadis (anak kecil) adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak memiliki hak perwalian (sebagai wali) kecuali menurut mazhab Syafi'i. Selanjutnya para ulama mazhab hanya berbeda pendapat dalam menentukan wali yang bukan ayah (selain ayah).<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat para mazhab (jumhur ulama) tersebut di atas, para *Fuqaha* hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan untuk menggauli atau digauli (*saghirah*) adalah terletak pada kesiapannya untuk melakukan aktivitas seksual. Islam memandang aktivitas seksual bagi laki-laki dan perempuan baru dapat terjadi jika ia telah *baligh* yang diartikan hingga si gadis tersebut harus mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik.<sup>10</sup>

## 2. Pengaturan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Syarat bagi kedua calon mempelai pada Pasal 15 ayat (1) KHI ditentukan, untuk calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini dimaksudkan dengan pertimbangan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sehingga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan) jika telah mencapai umur sebagaimana yang ditentukan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>8</sup> Yusuf Hanafi, *Op. Cit.*, hal. 20.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, hal. 166.

<sup>10</sup> Yusuf Hanafi, *Op. Cit.*, hal. 12.

dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.<sup>11</sup> Untuk semua usia anak di bawah tahun ini adalah dikatakan sebagai anak di bawah umur. Oleh sebabnya menurut KHI tidak boleh melaksanakan perkawinan.

Jika dari usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan usia 16 (enam belas) tahun untuk perempuan hingga mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka tahap usia ini diperbolehkannya kawin, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) KHI harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya. Pada Pasal 15 ayat (2) KHI ditetapkan syarat izin kedua orang tua.<sup>12</sup> Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan.

Pengaturan tentang perkawinan anak di bawah umur, jika tidak ada kedua orang tua khususnya orang tua calon istri, maka yang berwenang untuk memberi izin pernikahannya adalah wali nasab (kelompok kerabat) yang kedua, ketiga, dan keempat. Jika wali nasab tidak terpenuhi, maka yang memberikan izin pernikahan bagi calon istri adalah wali hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 KHI.<sup>13</sup>

### **3. Pengaturan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan batasan usia boleh kawin tampak pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"

---

<sup>11</sup> Tim Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga, Kumpulan Perundang-Undangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 237.

<sup>12</sup> Tim Pustaka Yustisia, *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> Pasal 20 ayat (2) KHI menentukan yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1) KHI ditentukan empat kelompok pembagaian wali nasab: kelompok pertama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kelompok kerabat yang terdiri dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki se ayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat adalah kelompok kerabat yang terdiri dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Kemudian terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Kemudian terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas usia boleh kawin diperlukan izin dari orang tua. Pasal tersebut menentukan, “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.<sup>14</sup>

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Konsekuensi pasal ini berarti yang perlu memperoleh izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan adalah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan umur 16 (enam belas) tahun bagi wanita.<sup>15</sup> Bertolak ukur pada ketentuan batas umur perkawinan laki-laki dan perempuan pada pada Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan *Junto* Pasal 15 KHI sebagaimana diatas, jika terjadi perkawinan di bawah batasan umur dimaksud tersebut, maka terpenuhinya rukun perkawinan tersebut tetap sah, tetapi para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 47.

<sup>15</sup> *Ibid.* Lihat juga: Linda Rahmita Panjaitan, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*, Tesis, (Medan: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal. 48.

Agama dengan alasan syarat usia minimal dari laki-laki dan atau perempuan dari yang menikah tersebut tidak terpenuhi.<sup>16</sup>

## **B. Akibat Hukum Dari Perkawinan Anak Di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Menurut Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

### **1. Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur**

Dispensasi kawin diperlukan dalam hal pemenuhan perintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yusuf Hanafi mengatakan bahwa penyimpangan terhadap usia kawin dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun wanita.<sup>17</sup> Dispensasi kawin diberikan oleh Pengadilan Agama, sehubungan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur boleh kawin, maka bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat umur dimaksud harus memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Ketentuan dispensasi ini juga sudah dianut atau ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) KHI yang pada intinya Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut.<sup>18</sup> Tetapi izin dimaksud di sini tidak mesti harus diperoleh dari orang tua, ada atau tidak adanya orang tua yang hendak kawin, atau wali kerabat lainnya,<sup>19</sup> Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin. Jadi singkatnya dispensasi kawin diberikan pada intinya untuk pemenuhan ketentuan dalam hukum Islam bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal batasan umur untuk kawin. Jika dengan pertimbangan yang matang dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan agama, maka dispensasi kawin tersebut harus diberikan oleh Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa, terkait dengan dispensasi kawin, jika terdapat adanya perkawinan anak di bawah umur sebagaimana di bawah umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka hakim di Pengadilan Agama, membolehkan perkawinan anak di bawah umur dengan cara

---

<sup>16</sup> Neng Djubaidah, *Op. Cit.*, hal. 93.

<sup>17</sup> Yusuf Hanafi, *Op. Cit.*, hal. 110-111.

<sup>18</sup> Tim Pustaka Yustisia, *Op. cit.*, hal. 237.

<sup>19</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hal. 21.



memberikan dispensasi kawin walaupun hukum Islam tidak membenarkan perkawinan di bawah umur melainkan dengan ukuran *baligh*. Dispensasi itu baru diberikan jika dimohonkan oleh orang tua pihak perempuan.<sup>20</sup>

Dispensasi kawin berlaku untuk anak perempuan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan untuk laki-laki yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dengan cara diajukan atau dimohonkan oleh orang tuanya ke Pengadilan Agama. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama adalah dengan cara memanggil orang tua bersama calon mempelai tersebut untuk memperoleh keterangan dari segi fisiknya dan psikologisnya calon mempelai, apakah sudah mampu atau tidak. Penilaian dari Pengadilan pada intinya bahwa dari kedua calon dan orang tua, harus didasarkan pada niat suci untuk memperoleh kebahagiaan dalam berumah tangga.<sup>21</sup>

Hakim pada Pengadilan Agama mendasarkan pertimbangannya memberikan dispensasi kawin bagi yang memohonkan dispensasi kawin berdasarkan pertimbangan pada 5 (lima) hukum dalam Fiqih Islam yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, dengan mendalilkan pada ketentuan-ketentuan pada Al-Qur'an dan Hadits, serta sumber-sumber lainnya untuk menetapkan wajib untuk melaksanakan perkawinan, atau sunnah, atau haram, atau makruh, atau perkawinan itu mubah.<sup>22</sup>

## **2. Akibat Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua**

### **a. Menurut Fiqih Islam**

Akibat hukum dari perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua menurut Fiqih Islam, tidak sah dan batal. Dalam suatu Hadits disebutkan, “Perkawinan itu tidak sah tanpa adanya wali”. Wali dimaksud di sini jangan diartikan hanya berpegang pada wali orang tua atau wali nasab yang lainnya, tetapi termasuk semua wali. Jika semua wali sebagaimana dimaksud baik wali

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Haspar Pulungan, Hakim di Pengadilan Agama Medan Tanggal 13 Juli 2013.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Haspar Pulungan, Hakim di Pengadilan Agama Medan Tanggal 13 Juli 2013.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Haspar Pulungan, Hakim di Pengadilan Agama Medan Tanggal 13 Juli 2013.

nasab maupun wali hakim tidak dipenuhi, barulah dapat dikatakan perkawinan itu batal atau tidak sah.<sup>23</sup>

Apabila salah satu ketentuan rukun dan syarat perkawinan yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul, tidak terpenuhi, maka perkawinan ini batal atau tidak sah secara Hukum Islam. Mengenai persyaratan wali sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:<sup>24</sup>

*”Siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batallah pernikahannya, dan jika ia telah bercampur, maka mas kawinnya itu bagi perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka Sultan lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.*

Hadits tersebut di atas mensyaratkan pernikahan tanpa izin walinya atau orang tuanya adalah batal pernikahan itu. Demikian pentingnya peran orang tua sebagai wali yang paling utama dalam pernikahan. Akan tetapi orang tua bukan satu-satunya wali yang bisa memberikan izin kawin atas anaknya

Pencegahan perkawinan berbeda dengan pembatalan perkawinan. Pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan itu berlanjut disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah.<sup>25</sup> Sedangkan pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung disebabkan hal-hal tertentu misalnya karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka pembatalan dapat diajukan oleh wali (orang tua).<sup>26</sup> Pencegahan perkawinan dilakukan oleh wali atau orang tua, para keluarga yang termasuk dalam wali nasab.<sup>27</sup>

## **b. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Akibat hukum dari perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua menurut KHI mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah dan batal secara hukum. Pengaturan tentang perkawinan anak di bawah umur, jika tidak ada kedua orang tua khususnya orang tua calon istri, maka yang berwenang untuk memberi izin pernikahannya adalah wali nasab (kelompok kerabat) yang kedua, ketiga, dan keempat. Jika wali nasab tidak terpenuhi, maka yang memberikan izin pernikahan

<sup>23</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha, 1978), hal. 116.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 456.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 150.

<sup>26</sup> Sudarsono, *Op. Cit*, hal. 106.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 100.

bagi calon istri adalah wali hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 KHI, menentukan yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim.

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain:<sup>28</sup>

- a. Perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
- b. Menjadi halal melakukan hubungan seksual antara suami dan istri.
- c. Mahar (mas kawin) yang diberikan suami menjadi milik istri.
- d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
- e. Berhak saling mewarisi antara suami dan istri serta anak-anak dengan orang tua.
- f. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- g. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

Akibat hukum dari perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua menurut KHI mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah dan batal secara hukum. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa salah satu rukun nikah tidak terpenuhi yaitu wali.<sup>29</sup>

### **C. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Akibat hukum dari perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelumnya diberikan batasan maksimal dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kemudian batasan minimal boleh kawin ditentukan di Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, Undang-Undang Perkawinan mengenal batasan umur perkawinan yang diizinkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, bahwa Undang-Undang Perkawinan berarti melarang perkawinan anak di bawah umur.

Ada 2 (dua) sisi kemungkinan akibat dari perkawinan anak di bawah umur, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tidak terpenuhinya batasan umur

---

<sup>28</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hal. 248.

<sup>29</sup> Moh. Rifa'i, *Op. Cit.*, hal. 455. Rukun Nikah adalah adanya laki-laki calon mempelai, perempuan calon mempelai, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul.

sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Junto Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, berakibat:

- a. Harus dicegah perkawinan itu, jika tanpa izin orang tuanya.
- b. Kemungkinan diberikan dispensasi kawin melalui permohonan izin dari orang tuanya yang dimohonkan ke Pengadilan Agama.

Jadi perlu diketahui di sini bahwa tidak terpenuhinya batasan umur untuk kawin bukan berarti secara serta merta perkawinan itu dibatalkan tetapi Undang-Undang Perkawinan memberikan istilah yang lebih lain yaitu pencegahan atau dicegah. Pencegahan pada yang disebut pertama di atas, jika sama sekali orang tuanya tidak memberikan izin kawin bagi anaknya yang masih di bawah umur tersebut. Pada konteks ini, akibat hukumnya dari perkawinan anak di bawah umur tersebut adalah batal.

Dalam konteks kedua perkawinan anak di bawah umur tidak menjadi batal dengan persyaratan tertentu yang dimohonkan oleh orang tua sebagai wali bahwa permohonan persyaratan itu dipertimbangkan berdasarkan tujuan suci dari perkawinan itu melalui pemanggilan para pihak calon mempelai oleh Pengadilan Agama untuk dimintai keterangan dan memeriksa kesiapan fisik dan mentalnya.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan inilah yang disebut dengan dispensasi kawin. Dispensasi itu sendiri menurut Subekti dan Tjitrosudibio artinya penyimpangan atau pengecualian.<sup>30</sup> Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidaklah berarti perkawinan itu akan menjadi batal secara hukum tetapi perkawinan anak dibawah umur dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dilangsungkan sebagai suatu pengecualian, dan pengecualian itu harus dimohonkan izinnya oleh orang tua kedua belah pihak atau pihak keluarga calon mempelai wanita kepada Pengadilan Agama.

### **C. Perbedaan Dan Persamaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Menurut Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

#### **1. Perbedaan Perkawinan Anak di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Menurut Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

---

<sup>30</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), hal. 36.

Untuk membedakan perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua dari sudut pandang Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) didasarkan beberapa aspek berikut.

#### **a Dasar hukum perkawinan**

##### **1). Fiqih Islam**

Dalam Fiqih Islam sama sekali tidak melarang perkawinan anak di bawah umur. Menurut Fiqih Islam semua tingkatan umur (usia) dapat melangsungkan perkawinan.<sup>31</sup> Walaupun dibolehkannya perkawinan anak di bawah umur tetapi masalah izin merupakan syarat mutlak dalam hukum Islam. Izin dimaksud di sini adalah izin dari orang tua khususnya orang tua dari pihak calon mempelai wanita

##### **2). Kompilasi Hukum Islam**

Dasar hukum larangan perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua di dalam KHI pengaturannya terdapat pada Pasal 15 ayat (1) KHI.

##### **3). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dasar hukum perkawinan anak di bawah umur terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada prinsipnya perkawinan anak di bawah umur menurut Pasal 7 ayat (1) dilarang menurut Undang-Undang ini, akan tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang ini terdapat suatu pengecualian atau penyimpangan dibolehkannya perkawinan anak di bawah umur. Ketentuan larangan perkawinan anak di bawah umur semakin jelas jika Pasal 7 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan, “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Berarti syarat pada Pasal 7 ayat (1) merupakan syarat dibolehkannya kawin, sedangkan syarat pada Pasal 6 ayat (2) merupakan syarat harus memperoleh izin dari orang tua.

#### **b. Tujuan Perkawinan**

Perbedaan dari segi tujuan perkawinan untuk semua tingkat umur juga berlaku pada khususnya untuk anak di bawah umur. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga

---

<sup>31</sup> Yusuf Hanafi, *Op. Cit.*, hal. 11.

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 2 dan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang semata-mata untuk menjalankan perintah Allah SWT serta melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Fiqih Islam tujuan perkawinan pada prinsipnya sama dengan tujuan yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KHI.

### **c. Sahnya Perkawinan**

Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, perkawinan khususnya perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua dikatakan sah, jika dilaksanakan menurut hukum yang berlaku dalam agamanya. Sedangkan sahnya perkawinan menurut agama Islam harus terlebih dahulu perkawinan itu dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, dalam Pasal 4 KHI, sahnya perkawinan jika didasarkan pada hukum Islam.<sup>32</sup>

### **d. Batasan Umur Untuk Kawin**

Undang-Undang Perkawinan mengenal batasan umur untuk diizinkan kawin yaitu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Batasan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Izin dimaksud hanya berlaku sejak terhitung batasan minimal dari Pasal 7 ayat (1) hingga batasan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sedangkan dalam Fiqih Islam tidak mengenal batasan umur untuk boleh kawin. Berdasarkan Fiqih Islam disepakati batas yang boleh kawin adalah *baligh*-nya seorang anak tersebut.<sup>33</sup>

### **e. Larangan Dalam Perkawinan**

Dalam Undang-Undang Perkawinan pencegahan berbeda dengan pembatalan. Pencegahan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan itu tidak terlaksana karena itu harus dibedakan antara pencegahan dan pembatalan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 25 dan hal. 27.

<sup>33</sup> *Ibid.* hal. 20.

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 63.

Pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung disebabkan hal-hal tertentu misalnya karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka pembatalan dapat diajukan oleh wali (orang tua).<sup>35</sup>

Persamaan pencegahan dan pembatalan tetap didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat-syarat melangsungkan perkawinan (*vide*: Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan dapat dicegah atau dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Apabila setelah terjadinya perkawinan anak di bawah umur ternyata tidak diizinkan oleh orang tua pihak perempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dapat dimohonkan pembatalannya ke Pengadilan Agama.

Pencegahan dalam Fiqih Islam bukan ditekankan pada prosedur administrasi atau syarat-syarat yang diatur pada perundang-undangan, tetapi pencegahan perkawinan anak di bawah umur menurut Fiqih Islam lebih banyak ditekankan pada keimanan seseorang di dalam menganut agamanya. Orang yang benar-benar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, dan mentaati Sunnah Rasulullah SAW serta berpegang teguh pada hukum Fiqih yang berlaku padanya.<sup>36</sup>

Sedangkan pembatalan perkawinan anak di bawah umur dalam Fiqih Islam jelas menganut asas perkawinan poligami terbatas dan tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Tetapi dalam KHI selain dikenal istilah Pencegahan Perkawinan (Pasal 60 s/d Pasal 69 KHI) juga dikenal istilah pembatalan perkawinan (Pasal 70 s/d Pasal 76 KHI).

#### **f. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dikenal istilah rukun perkawinan melainkan hanya yang dikenal adalah istilah syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan dalam KHI rukun dan syarat-syarat perkawinan itu ditetapkan dalam Pasal 14 hingga Pasal 38 KHI. Rukun perkawinan juga ditetapkan dalam Fiqih Islam yang terdiri dari: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Sudarsono, *Op. Cit.* hal. 106.

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 72.

<sup>37</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Op. cit.*, hal. 426-429.

## **2. Persamaan Perkawinan Anak di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Menurut Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Terdapat kesamaan pengaturan antara Fiqih Islam, KHI dan Undang-Undang Perkawinan mengenai dispensasi kawin. Dispensasi kawin dikenal dalam Fiqih Islam, KHI dan dalam Undang-Undang Perkawinan sama-sama diatur tentang dispensasi. Hukum Islam dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah membenarkan perkawinan terhadap anak kecil yang sudah baligh, bukan berdasarkan pada umur si anak. Dengan pembenaran ini, maka halal secara hukum Islam menikahi anak yang belum cukup umur sebagaimana umur yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Juncto Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 KHI.

Undang-Undang Perkawinan mengenal batasan umur untuk diizinkan kawin yaitu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Batasan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Izin dimaksud hanya berlaku sejak terhitung batasan minimal dari Pasal 7 ayat (1) hingga batasan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Sedangkan dalam Fiqih Islam tidak mengenal batasan umur untuk boleh kawin. Berdasarkan Fiqih Islam disepakati batas yang boleh kawin adalah *baligh*-nya seorang anak tersebut.<sup>38</sup> Maka ketentuan batasan umur dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dikecualikan dengan cara memberikan dispensasi kawin. Dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan, "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita".

Dengan demikian, dispensasi kawin menjadi kebutuhan dalam Fiqih Islam, KHI maupun dalam Undang-Undang Perkawinan sama-sama memberikan legalitas tentang dispensasi atau pengecualian kawin dalam hal perkawinan anak

---

<sup>38</sup> Neng Djubaidah, *Op. Cit.*, hal. 20.



di bawah umur dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari dari orang tua kedua belah pihak khususnya orang tua pihak perempuan.

### **III. Kesimpulan Dan Saran**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Pengaturan tentang perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua dalam Fiqih Islam, KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masing-masing tidak dibenarkan. Ketiga dasar hukum perkawinan ini melarang perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua.

Pertama pengaturan tentang perkawinan anak dibawah umur tanpa izin orang tua dalam Fiqih Islam memiliki kemiripan (sama) dengan ketentuan KHI karena sumber KHI adalah Fiqih Islam.

Kedua pengaturan tentang perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua dalam KHI tidak dengan tegas diatur. KHI hanya mengenal salah satu rukun nikah adalah adanya wali (Pasal 14 huruf c) sedangkan “tanpa izin orang tua” tidak diatur, batasan diperbolehkan kawin juga tidak diatur di dalam KHI.

Ketiga pengaturan tentang perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilarang melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan jika dibawah 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).

2. Pertama akibat hukum menurut Fiqih Islam adalah tidak sah atau perkawinan itu batal. Walaupun Fiqih Islam mengakui perkawinan anak di bawah umur (tanpa batasan umur) tetapi harus memperoleh izin dari orang tua. tetapi anak tidak meminta izin kepada orang tuanya, maka perkawinan tersebut “batal demi hukum”.

Kedua akibat hukum menurut KHI adalah tidak sah atau perkawinan itu batal (Pasal 71 huruf e KHI). Berarti perkawinan tersebut akan menjadi sah bila ketentuan rukun dan syarat dalam Pasal 14 KHI telah terpenuhi (rukunnya yaitu harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul).

Ketiga akibat hukum menurut Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 22 Undang-Undang perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.

3. Perbedaan dan persamaan perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua menurut Fiqih Islam, KHI, dan Undang-Undang Perkawinan menunjukkan perbedaan yang lebih dominan daripada persamaan. Perbedaan yang mencolok terdapat antara Fiqih Islam dengan KHI dan Undang-Undang Perkawinan yakni pada aspek penentuan batasan umur untuk kawin dan pemberian izin dari orang tua. Fiqih Islam tidak mengenal umur untuk kawin tetapi diukur berdasarkan *baligh*-nya laki-laki dan perempuan. Sedangkan Pasal 15 KHI menentukan batasan umur bagi anak untuk diberikannya izin kawin dari orang tuanya sejak anak tersebut sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan sudah berumur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan perkawinan diizinkan bagi laki-laki jika sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun dan paling maksimal izin orang tua itu berlaku hingga keduanya (laki-laki dan perempuan) sudah berumur 21 tahun. Ketiga dasar hukum ini (baik Fiqih Islam, KHI maupun Undang-Undang Perkawinan) sama-sama melarang perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua. Pengecualiannya juga mengandung persamaan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) KHI dengan cara sama-sama memberikan dispensasi kawin melalui permohonan orang tua pihak calon mempelai perempuan.

## **B. Saran**

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus menjadi pedoman penting bagi setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan, ketentuan ini tidak menjustifikasi salah atau benarnya ketentuan perkawinan yang diajarkan oleh agama. Tetapi yang lebih penting adalah eksistensi setiap orang tidak mungkin terlepas dari kepentingan penguasa, maka Undang-Undang Perkawinan tetap dipedomani untuk memperoleh legalitas dan kepastian hukum perkawinan.
2. Untuk menghindari akibat dari perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua, harus dilakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya perkawinan,

atau dilakukan upaya pembatalan jika perkawinan tersebut telah terlanjur dilaksanakan. Pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang tidak memenuhi rukun dan syarat dinilai lebih membawa manfaat dibandingkan dampak atau akibat-akibat yang ditimbulkan jika perkawinan itu tetap dilaksanakan.

3. Batasan umur untuk kawin sebagaimana dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan tersebut mesti diubah dengan menaikkan batasan minimal umur dari 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan menjadi minimal 18 (delapan belas) tahun tanpa membedakan antara umur laki-laki dan perempuan, setidaknya dapat memenuhi batasan umur menurut Konvensi Hak Anak dengan batasan minimal 20 (dua puluh) pada umur ini paling memenuhi syarat kematangan biologis dan psikis. Sehingga lembaga dispensasi kawin perlu dihapuskan, sehubungan dengan teori kemaslahatan menghendaki perkawinan harus mendatangkan manfaat bagi suami maupun istri serta keluarga-keluarganya. Perkawinan anak dengan ukuran *baligh* saja berpotensi menimbulkan kematian bagi ibu di usia muda, perkawinan muda cenderung diakhiri dengan perceraian, disebabkan ketidakmatangan fisik maupun mental

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Alhamdani, HSA, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa fi 'Ilm Al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fiqih Islam, HAM Internasional, dan Undang-Undang Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Hajar, Ibnu, *Al 'Asqalani, Fathul Bari*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1999.

- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha, 1978.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Tim Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga, Kumpulan Perundang-Undangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

#### **B. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan).
- Hukum Islam (antara lain: Alqur'an, Al-Hadits, Sunnah Rasulullah SAW, Ijma', Qiyas, dan pendapat para ulama, termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### **C. Makalah, Jurnal, dan Artikel**

- Panjaitan, Linda Rahmita, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*, Tesis, Medan: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.